



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2021 NOMOR 3

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke...

ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK 0.7/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
15. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

menetapkan...

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban...

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.
11. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUM Kampung adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung.
12. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disebut IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana...

Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.

14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.
17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat *severe acute respiratory syndrome virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## BAB II

### JUMLAH KAMPUNG

#### Pasal 2

Kampung dalam Kabupaten Way Kanan berjumlah 221 Kampung.

### BAB III PENGALOKASIAN

#### Bagian Kesatu Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Kampung

##### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Kampung;
- b. alokasi afirmasi setiap Kampung;
- c. alokasi kinerja setiap Kampung; dan
- d. alokasi formula setiap Kampung

##### Pasal 4

- (1) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Pembagian besaran alokasi dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp. 641.574.000...

- c. Rp. 641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.0000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk di atas 10.001 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afiriasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kampung dihitung dengan ketentuan sebagai berikut.

$$AA \text{ Desa} = (0,01 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) desa...

- (3) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (6) Besaran alokasi afirmasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada Kampung dengan penilaian kinerja terbaik yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Kampung di Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pagu alokasi kinerja dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik.
- (3) Kampung penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja, dengan ketentuan:

a. Kriteria...

- a. Kriteria utama merupakan kampung yang tidak menerima alokasi afirmasi.
  - b. Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan urutan kampung yang mempunyai skor kinerja terbaik berdasarkan variabel:
    1. Pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20%; (dua puluh persen);
    2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    3. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
    4. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung menggunakan rumus:
- $$\text{Skor kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$
- Keterangan:
- Skor kinerja = skor kinerja setiap kampung
- Y1 = pengelolaan keuangan kampung
- Y2 = pengelolaan Dana Desa
- Y3 = capaian keluaran Dana Desa
- Y4 = capaian hasil pembangunan kampung
- (5) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana pada ayat (3) huruf b angka 1 dinilai dari:
- a. perubahan rasio PAKampung terhadap total pendapatan APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Kampung dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan...

- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (3) huruf b angka 2 dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Kampung sebagaimana pada ayat (3) huruf b angka 4 dinilai dari:
- a. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status IDM dengan Kampung, status Kampung terakhir bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Kampung dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 7

- (1) Pagu alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dalam Pasal 2 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

a. jumlah...

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. luas wilayah dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).

(2) Besaran alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Way Kanan

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Way Kanan

Z4 = Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Way Kanan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Way Kanan

(3) Angka Kemiskian Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan...

ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kampung dan IKG Kampung.

- (4) IKG Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan / atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40%...

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
  2. Kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
  2. Kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. Kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November

untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;

#### Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

1. surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran Dana Desa tahap I;
2. surat dari Kepala Kampung perihal permohonan penyaluran Dana Desa tahap I;
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Desa Tahap II dari Kepala Kampung;
4. Lembar konfirmasi Dana Desa tahap I bermaterai;
5. Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2021;
6. Photokopi Rekening Kampung;
7. Photokopi NPWP Kampung.

b. tahap II sebesar yang dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf b berupa:

1. surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran Dana Desa tahap II;
2. surat dari Kepala Kampung perihal permohonan penyaluran Dana Desa tahap II;
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Desa tahap II dari Kepala Kampung;
4. lembar konfirmasi Dana Desa tahap II bermaterai;
5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

6. laporan...

6. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  7. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  8. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung.
  9. Photokopi Rekening Kampung; dan
  10. Photokopi NPWP Kampung.
- c. tahap III sebesar yang dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf c berupa:
1. surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran Dana Desa tahap III;
  2. surat dari Kepala Kampung perihal permohonan penyaluran Dana Desa tahap III;
  3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Desa tahap III dari Kepala Kampung;
  4. lembar konfirmasi Dana Desa tahap III bermaterai;
  5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen...

- persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
6. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya;
  7. Photokopi Rekening Kampung; dan
  8. Photokopi NPWP Kampung.
- (2) Dalam hal kampung tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dan ayat (1) huruf c angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dan ayat (1) huruf c angka 5 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, kepala Kampung memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan...

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (4) Kepala kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima...

penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 7, kepala kampung menyampaikan perubahan peraturan kepala kampung dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (7) Kepala kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### BAB IV

#### PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada...

pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas penggunaan Dana Desa.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kampung bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala kampung.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan...

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di kampung.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) setelah mendapatkan Persetujuan...

persetujuan Bupati.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu untuk pembayaran insentif RT.
- (5) Pembayaran insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dengan ketentuan:
  - a. penganggaran besaran insentif RT Tahun 2020 sebesar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 450.000,-;
  - b. jumlah RT mengikuti jumlah RT pada tahun 2020.
- (6) Pembayaran insentif RT dilakukan secara non tunai melalui rekening Kampung ke rekening masing-masing RT per triwulan.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RKP Kampung.

(4) Dalam...

- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

## BAB V

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Publikasi

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan:
  - a. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - b. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Hasil Musyawarah Kampung; dan
  - b. Data kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Kampung, dokumen RKP Kampung, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dokumen APBKampung, dan dokumen Laporan Realisasi APBKampung.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama dan alamat KPM BLT Desa.
- (4) Publikasi APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 17...

#### Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Sarana publikasi dapat dilakukan melalui:
  - a. Baliho;
  - b. papan informasi Kampung; atau
  - c. *Website* Kampung.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Kampung menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kampung menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati dan menjadi syarat penyaluran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen *print out* dan dokumen digital menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (3) Dokumen laporan pada aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam melakukan perekaman laporan penggunaan Dana Desa pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Perekaman laporan penggunaan Dana Desa pada aplikasi OM SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. laporan...

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- b. laporan realisasi KPM BLT Desa;
- c. laporan sisa Dana Desa di RKK; dan
- d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun sebelumnya.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKK; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Kampung, berupa:
  - a. Kepala...

- a. Kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
  - b. Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Dalam hal Kepala Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
    - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
    - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
  - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
  - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada  
Direktur...

Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 21

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKK.
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Kampung tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direkoterat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah kampung khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil...

- (4) Hasil musyawarah kampung khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditunjuk.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah kampung tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) hasil musyawarah khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OM SPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada tahun anggaran 2022.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24...

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR...

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata TK I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 3  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN  
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG  
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG
1	2	3	(Rp.) 4	(Rp.) 7	(Rp.) 8	(Rp.) 9	(Rp.) 10
1	BLAMBANGAN UMPU	LEMBASUNG	641,574,000	0	0	222,758,000	864,332,000
2		GUNUNG SANGKARAN	641,574,000	0	0	249,487,000	891,061,000
3		TANJUNG RAJA GIHAM	641,574,000	171,591,000	0	372,187,000	1,185,352,000
4		SEGARA MIDER	561,574,000	0	0	167,944,000	729,518,000
5		UMPU BHAKTI	641,574,000	0	0	99,852,000	741,426,000
6		SANGKARAN BHAKTI	641,574,000	0	0	134,281,000	775,855,000
7		BUMI BARU	641,574,000	0	0	118,099,000	759,673,000
8		TANJUNG SARI	641,574,000	0	0	125,513,000	767,087,000
9		SRI REJEKI	641,574,000	0	0	227,623,000	869,197,000
10		KARANG UMPU	641,574,000	0	0	232,628,000	874,202,000
11		UMPU KENCANA	641,574,000	0	0	110,718,000	752,292,000
12		TANJUNG RAJA SAKTI	641,574,000	171,591,000	0	280,387,000	1,093,552,000
13	KASUI	DATAR BANCONG	641,574,000	0	0	130,360,000	771,934,000
14		KEDATON	641,574,000	0	288,153,000	381,568,000	1,311,295,000
15		KARANG LANTANG	641,574,000	0	0	231,847,000	873,421,000
16		KASUI LAMA	641,574,000	0	0	168,776,000	810,350,000
17		KAMPUNG BARU	641,574,000	0	0	176,191,000	817,765,000
18		JUKUH KEMUNING	561,574,000	0	0	186,244,000	747,818,000
19		KOTA WAY	641,574,000	0	288,153,000	314,296,000	1,244,023,000
20		TANJUNG KURUNG	641,574,000	0	0	246,479,000	888,053,000
21		TALANG MANGGA	641,574,000	0	0	111,959,000	753,533,000
22		TANJUNG HARAPAN	641,574,000	0	288,153,000	260,169,000	1,189,896,000
23		SINAR GADING	561,574,000	0	288,153,000	152,876,000	1,002,603,000
24		JAYA TINGGI	641,574,000	0	0	104,509,000	746,083,000
25		SUKA JADI	641,574,000	0	0	220,029,000	861,603,000
26		GELOMBANG PANJANG	561,574,000	0	288,153,000	150,110,000	999,837,000
27		TANGKAS	561,574,000	0	288,153,000	112,507,000	962,234,000
28		TANJUNG BULAN	641,574,000	0	0	177,149,000	818,723,000
29		TANJUNGKURUNG LAMA	641,574,000	0	0	236,419,000	877,993,000
30		BUKITBATU	641,574,000	0	0	205,640,000	847,214,000
31	BANJIT	BUNGLAI	641,574,000	171,591,000	0	451,947,000	1,265,112,000
32		CAMPANG LAPAN	641,574,000	0	0	167,954,000	809,528,000
33		SUMBER BARU	641,574,000	0	0	396,244,000	1,037,818,000
34		RANTAU TEMIANG	641,574,000	171,591,000	0	343,418,000	1,156,583,000
35		JUKU BATU	641,574,000	0	288,153,000	565,024,000	1,494,751,000
36		BALI SADAR	641,574,000	0	0	72,089,000	713,663,000
37		DONO MULYO	641,574,000	0	0	132,935,000	774,509,000
38		BALI SADAR UTARA	641,574,000	0	0	181,365,000	822,939,000
39		BALI SADAR SELATAN	641,574,000	0	0	113,874,000	755,448,000
40		MENANGA JAYA	641,574,000	0	288,153,000	371,431,000	1,301,158,000
41		ARGO MULYO	641,574,000	0	0	314,794,000	956,368,000
42		RANTAU JAYA	641,574,000	0	0	187,549,000	829,123,000
43		REBANG TINGGI	641,574,000	0	0	409,525,000	1,051,099,000
44		SIMPANG ASAM	641,574,000	0	0	166,508,000	808,082,000

No.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG
1	2	3	(Rp.) 4	(Rp.) 7	(Rp.) 8	(Rp.) 9	(Rp.) 10
45		BANDAR AGUNG	641,574,000	0	0	182,036,000	823,610,000
46		KEMU	641,574,000	0	0	216,566,000	858,140,000
47		MENANGA SIAMANG	641,574,000	171,591,000	0	443,264,000	1,256,429,000
48		NEKI	641,574,000	0	0	200,729,000	842,303,000
49		SUMBER SARI	641,574,000	0	0	152,265,000	793,839,000
50	BARADATU	SETIA NEGARA	641,574,000	0	0	120,114,000	761,688,000
51		GEDUNG PAKUON	641,574,000	0	0	166,150,000	807,724,000
52		BUMI MERAPI	641,574,000	0	0	77,808,000	719,382,000
53		BANJAR SARI	561,574,000	0	0	77,443,000	639,017,000
54		GUNUNG KATUN	721,575,000	0	0	288,724,000	1,010,299,000
55		BHAKTI NEGARA	641,574,000	0	0	97,645,000	739,219,000
56		BUMI REJO	641,574,000	0	0	133,734,000	775,308,000
57		SUKOSARI	641,574,000	0	0	121,964,000	763,538,000
58		BANJAR SETIA	561,574,000	0	288,153,000	137,596,000	987,323,000
59		GEDUNG REJO	641,574,000	0	0	136,394,000	777,968,000
60		BANJAR AGUNG	641,574,000	0	0	230,116,000	871,690,000
61		CUGAH	641,574,000	0	0	109,952,000	751,526,000
62		TIUH BALAK I	561,574,000	0	0	70,146,000	631,720,000
63		TIUH BALAK	641,574,000	0	0	182,069,000	823,643,000
64		MEKAR ASRI	641,574,000	0	288,153,000	136,651,000	1,066,378,000
65		BANJAR NEGARA	641,574,000	0	0	148,402,000	789,976,000
66		BANJAR MASIN	561,574,000	0	0	153,140,000	714,714,000
67		BANJAR MULYA	641,574,000	0	0	239,576,000	881,150,000
68		BANJAR BARU	561,574,000	0	0	108,170,000	669,744,000
69	BAHUGA	TULANG BAWANG	561,574,000	0	0	104,674,000	666,248,000
70		MESIR UDIK	481,573,000	0	0	115,895,000	597,468,000
71		MESIR ILIR	641,574,000	0	0	175,630,000	817,204,000
72		SAPTO RENGGO	641,574,000	0	0	160,936,000	802,510,000
73		GIRI HARJO	641,574,000	0	0	179,013,000	820,587,000
74		BUMI AGUNG WATES	641,574,000	0	0	99,830,000	741,404,000
75		SERDANG KURING	641,574,000	0	0	129,662,000	771,236,000
76		BUMI AGUNG	561,574,000	0	0	138,431,000	700,005,000
77		MEKAR JAYA	561,574,000	0	0	134,098,000	695,672,000
78		PUTRA DEWA	561,574,000	0	0	133,662,000	695,236,000
79		DEWA AGUNG	561,574,000	0	0	139,414,000	700,988,000
80	PAKUAN RATU	KARANG AGUNG	641,574,000	0	0	300,976,000	942,550,000
81		TANJUNG RATU	641,574,000	0	0	188,664,000	830,238,000
82		PAKUAN RATU	641,574,000	0	0	119,926,000	761,500,000
83		GUNUNG CAHYA	561,574,000	0	0	109,362,000	670,936,000
84		RUMBIH	641,574,000	0	288,153,000	177,824,000	1,107,551,000
85		NEGARA RATU	561,574,000	0	0	197,740,000	759,314,000
86		NEGARA SAKTI	641,574,000	0	0	297,650,000	939,224,000
87		SUKABUMI	641,574,000	0	0	164,139,000	805,713,000
88		TANJUNG AGUNG	641,574,000	0	288,153,000	161,391,000	1,091,118,000
89		TANJUNG SERUPA	641,574,000	0	0	241,228,000	882,802,000
90		NEGARA HARJA	641,574,000	0	0	168,373,000	809,947,000
91		BAKTI NEGARA	641,574,000	0	0	138,169,000	779,743,000
92		PAKUAN BARU	641,574,000	0	0	152,299,000	793,873,000
93		NEGARA TAMA	641,574,000	0	0	104,576,000	746,150,000
94		WAY TAWAR	641,574,000	0	0	109,694,000	751,268,000
95		GUNUNG WARAS	641,574,000	0	0	295,494,000	937,068,000
96		PAKUAN SAKTI	641,574,000	0	0	128,728,000	770,302,000
97		SERUPA INDAH	641,574,000	0	0	112,324,000	753,898,000

No.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG
1	2	3	(Rp.) 4	(Rp.) 7	(Rp.) 8	(Rp.) 9	(Rp.) 10
98		BUMI MULYA	641,574,000	0	0	104,331,000	745,905,000
99	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	641,574,000	0	0	109,057,000	750,631,000
100		BANDAR DALAM	641,574,000	0	0	319,716,000	961,290,000
101		PULAU BATU	641,574,000	0	0	151,790,000	793,364,000
102		PENENGAHAN	561,574,000	0	0	175,928,000	737,502,000
103		KARYA AGUNG	641,574,000	0	0	153,201,000	794,775,000
104		SUNSANG	641,574,000	0	0	164,771,000	806,345,000
105		KOTA BARU	641,574,000	0	0	146,802,000	788,376,000
106		KOTABUMI WAY KANAN	641,574,000	0	0	354,972,000	996,546,000
107		GEDUNG MENENG	641,574,000	0	0	264,298,000	905,872,000
108		GEDUNG HARAPAN	641,574,000	0	288,153,000	163,244,000	1,092,971,000
109		TANJUNG REJO	641,574,000	0	0	141,404,000	782,978,000
110		KALI PAPAN	721,575,000	0	0	243,249,000	964,824,000
111		MULYA SARI	641,574,000	0	0	153,686,000	795,260,000
112		WAY LIMAU	561,574,000	0	0	102,727,000	664,301,000
113		GEDUNG JAYA	561,574,000	0	0	128,551,000	690,125,000
114		REJO SARI	641,574,000	0	0	175,384,000	816,958,000
115		BANDAR KASIH	641,574,000	0	0	167,159,000	808,733,000
116		SUMBER REJEKI	641,574,000	0	0	258,069,000	899,643,000
117		MULYA AGUNG	641,574,000	0	0	111,606,000	753,180,000
118	WAY TUBA	WAY TUBA	641,574,000	0	0	218,718,000	860,292,000
119		KARYA JAYA	641,574,000	0	0	123,750,000	765,324,000
120		SAY UMPU	641,574,000	0	0	186,665,000	828,239,000
121		BERINGIN JAYA	641,574,000	0	0	131,293,000	772,867,000
122		SUMA MUKTI	641,574,000	0	0	87,932,000	729,506,000
123		RAMSAI	641,574,000	0	0	139,373,000	780,947,000
124		BANDAR SARI	641,574,000	0	0	157,829,000	799,403,000
125		BUMI DANA	641,574,000	0	0	203,180,000	844,754,000
126		BUKIT GEMURUH	641,574,000	0	0	202,656,000	844,230,000
127		WAY MENCAR	561,574,000	0	288,153,000	119,700,000	969,427,000
128		WAY PISANG	641,574,000	0	0	125,063,000	766,637,000
129		BUKIT HARAPAN	561,574,000	0	0	165,920,000	727,494,000
130		WAY TUBA ASRI	641,574,000	0	0	166,159,000	807,733,000
131	REBANG TANGKAS	LEBAK PENIANGAN	641,574,000	0	288,153,000	315,892,000	1,245,619,000
132		TANJUNG TIGA	641,574,000	0	0	179,528,000	821,102,000
133		MADANG JAYA	641,574,000	0	0	203,379,000	844,953,000
134		AIR RINGKIH	641,574,000	0	0	177,397,000	818,971,000
135		GUNUNG SARI	641,574,000	0	288,153,000	179,370,000	1,109,097,000
136		SIMPANG TIGA	641,574,000	0	0	541,902,000	1,183,476,000
137		TANJUNG RAYA	641,574,000	0	0	146,465,000	788,039,000
138		BERINGIN JAYA	641,574,000	0	0	156,405,000	797,979,000
139		KARYA MAJU	641,574,000	0	0	166,299,000	807,873,000
140		MULYA JAYA	641,574,000	0	0	175,776,000	817,350,000
141		GUNUNG LABUHAN	641,574,000	0	0	141,621,000	783,195,000
142		GUNUNG BARU	641,574,000	0	0	116,846,000	758,420,000
143		BANJAR SAKTI	561,574,000	0	0	132,040,000	693,614,000
144		SUKA NEGERI	641,574,000	0	0	264,917,000	906,491,000
145		NEGERI MULYO	641,574,000	0	0	87,696,000	729,270,000
146		NEGERI SUNGKAI	561,574,000	0	0	152,305,000	713,879,000
147		GUNUNG SARI	641,574,000	0	0	133,430,000	775,004,000
148		WAY TUBA	641,574,000	0	0	77,549,000	719,123,000
149		BENGKULU	641,574,000	0	0	257,326,000	898,900,000
150		BENGKULU REJO	641,574,000	0	0	312,792,000	954,366,000

No.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG
1	2	3	(Rp.) 4	(Rp.) 7	(Rp.) 8	(Rp.) 9	(Rp.) 10
151	GUNUNG LABUHAN	KAYU BATU	561,574,000	0	0	94,146,000	655,720,000
152		BENGKULU RAMAN	561,574,000	0	0	120,319,000	681,893,000
153		BENGKULU JAYA	641,574,000	0	0	180,000,000	821,574,000
154		TIUH BALAK II	641,574,000	0	0	291,464,000	933,038,000
155		CURUP PATAH	641,574,000	0	0	165,054,000	806,628,000
156		SUKARAME	641,574,000	0	0	167,473,000	809,047,000
157		BANJAR RATU	641,574,000	0	0	287,165,000	928,739,000
158		NEGERI UJAN MAS	561,574,000	0	0	131,462,000	693,036,000
159		BENGKULU TENGAH	641,574,000	0	0	186,384,000	827,958,000
160		GUNUNGPEKUWON	561,574,000	0	0	86,390,000	647,964,000
161		LABUHAN JAYA	561,574,000	0	0	137,427,000	699,001,000
162	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	641,574,000	0	0	241,416,000	882,990,000
163		PURWA AGUNG	641,574,000	0	0	166,385,000	807,959,000
164		PURWA NEGARA	641,574,000	0	0	250,110,000	891,684,000
165		SETIA NEGARA	641,574,000	0	0	241,900,000	883,474,000
166		SRI MULYO	641,574,000	0	0	183,734,000	825,308,000
167		SRI MENANTI	561,574,000	0	0	200,536,000	762,110,000
168		KARTA JAYA	641,574,000	0	288,153,000	213,185,000	1,142,912,000
169		GISTING JAYA	641,574,000	0	0	183,436,000	825,010,000
170		MARGA JAYA	641,574,000	0	0	123,053,000	764,627,000
171		BUMI JAYA	641,574,000	0	0	123,534,000	765,108,000
172		GEDUNG JAYA	641,574,000	0	0	155,404,000	796,978,000
173		ADI JAYA	641,574,000	0	0	115,039,000	756,613,000
174		SARI JAYA	561,574,000	0	0	163,005,000	724,579,000
175		NEGARA MULYA	561,574,000	0	288,153,000	153,963,000	1,003,690,000
176		KOTA JAWA	641,574,000	0	0	148,763,000	790,337,000
177	NEGERI BESAR	NEGERI BESAR	641,574,000	0	0	203,511,000	845,085,000
178		KILING-KILING	641,574,000	0	0	159,637,000	801,211,000
179		KALIAWI	561,574,000	0	0	131,573,000	693,147,000
180		TIUH BARU	641,574,000	0	0	277,584,000	919,158,000
181		BIMA SAKTI	641,574,000	0	0	149,171,000	790,745,000
182		TEGAL MUKTI	641,574,000	0	0	128,894,000	770,468,000
183		NEGARA JAYA	641,574,000	0	0	130,556,000	772,130,000
184		PAGAR IMAN	641,574,000	0	0	200,575,000	842,149,000
185		SRI BASUKI	641,574,000	0	0	112,327,000	753,901,000
186		KALIAWI INDAH	561,574,000	0	0	83,337,000	644,911,000
187		NEGERI JAYA	641,574,000	0	0	107,604,000	749,178,000
188		TANJUNG MAS	561,574,000	0	0	90,340,000	651,914,000
189		NEGERI KASIH	561,574,000	0	0	96,614,000	658,188,000
190	BUAY BAHUGA	BUMI HARJO	641,574,000	0	0	133,184,000	774,758,000
191		PUNJUL AGUNG	641,574,000	0	0	113,857,000	755,431,000
192		SRI TUNGAL	641,574,000	0	0	105,402,000	746,976,000
193		SUKA BUMI	641,574,000	0	0	109,008,000	750,582,000
194		SUKA AGUNG	641,574,000	0	288,153,000	71,524,000	1,001,251,000
195		SUKADANA	641,574,000	0	0	142,064,000	783,638,000
196		NUAR MAJU	641,574,000	0	0	113,242,000	754,816,000
197		LEBUNG LAWE	641,574,000	0	0	92,800,000	734,374,000
198		WAY AGUNG	641,574,000	0	0	70,608,000	712,182,000
199	BUMI AGUNG	PISANG BARU	721,575,000	0	0	147,550,000	869,125,000
200		PISANG INDAH	641,574,000	0	288,153,000	137,535,000	1,067,262,000
201		SRI NUMPI	561,574,000	0	0	125,178,000	686,752,000
202		MULYO HARJO	641,574,000	0	0	90,621,000	732,195,000
203		BUMI AGUNG	721,575,000	0	0	326,109,000	1,047,684,000

No.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	7	8	9	10
204		KARANGAN	641,574,000	0	288,153,000	241,563,000	1,171,290,000
205		WONO HARJO	641,574,000	0	0	121,938,000	763,512,000
206		SUKA MAJU	641,574,000	0	0	113,193,000	754,767,000
207		TANJUNG DALOM	641,574,000	0	288,153,000	157,642,000	1,087,369,000
208		BUMI SAY AGUNG	641,574,000	0	0	152,439,000	794,013,000
209	UMPU SEMENGUK	NEGERI BATIN	721,575,000	0	0	240,703,000	962,278,000
210		GISTANG	641,574,000	0	0	327,778,000	969,352,000
211		RAMBANG JAYA	561,574,000	0	0	198,457,000	760,031,000
212		PANCA NEGERI	641,574,000	171,591,000	0	286,607,000	1,099,772,000
213		NEGERI BUMI PUTERA	641,574,000	0	0	222,298,000	863,872,000
214		GEDUNG RIANG	641,574,000	0	0	117,475,000	759,049,000
215		GEDUNG BATIN	641,574,000	0	0	284,843,000	926,417,000
216		SIDOARJO	641,574,000	0	0	141,319,000	782,893,000
217		BUMI RATU	641,574,000	0	0	144,947,000	786,521,000
218		SRIWIJAYA	641,574,000	0	0	105,784,000	747,358,000
219		BRATAYUDA	641,574,000	0	0	99,483,000	741,057,000
220		NEGERI BARU	721,575,000	0	0	412,901,000	1,134,476,000
221		OJOLALI	641,574,000	0	0	122,480,000	764,054,000
TOTAL DANA DESA			139,067,859,000	1,029,546,000	6,339,366,000	39,583,838,000	186,020,609,000

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata Tk I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,  
  
dto,  
  
RADEN ADIPATI SURYA